

AKUNTAN DAN AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF POSMODERNISME

*Didik Noeryono Basar**

Abstrak: Akuntansi yang digunakan dalam dunia bisnis sekarang tidak lain merupakan konsep yang dibuat dan dihasilkan oleh akuntan. Praktik akuntansi baik secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan dan membentuk realitas sosial yang dipengaruhi oleh jaringan-jaringan kerja realitas sosial yang sudah tercipta. Jaringan-jaringan kerja realitas sosial ini merupakan jaringan kuasa yang dengan *power* (kuasanya) mampu memikat, mengikat dan memilih kehidupan sosial masyarakat ke dalam jaringan kerjanya.

Menyadari bahwa realitas sosial mempunyai kuasa yang memperangkap individu-individu anggota masyarakat ke dalam suatu jaringan tertentu, maka suatu hal yang krusial dan patut dicermati di sini adalah : (1) realitas sosial macam apa yang harus dibentuk atau diciptakan sehubungan dengan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang akan dikehandaki. (2) Apa serta bagaimana peran akuntan dalam upaya menciptakan realitas sosial yang di maksud.

Uraian ini mencoba untuk mengkaji secara kritis kedua aspek tersebut di atas, yaitu realitas sosial dan peran akuntan, dalam kerangka analisis postmodernism dengan (1) memberikan wawasan yang luas, cerdas, dan kritis terhadap fenomena-fenomena sosial terutama yang terbentuk melalui proses praktik-praktik akuntansi dan bisnis dengan cara "keluar" dari "perangkap logosentrisme"

* Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

realitas sosial yang ada, untuk kemudian memberikan arah pembentukan realitas dan tatanan sosial yang lebih baik, (2) memberikan pandangan kritis tentang ethical consciousness (kesadaran etis) dan peran akuntan dalam keterlibatan aktif akuntan membentuk realitas sosial.

Kata Kunci : *Akuntan, Posmodernisme, Kapitalis, Akuntansi Syari'ah*

Pendahuluan

Posmodernisme pada dasarnya adalah sebuah pemahaman yang mencoba "meletakkan dirinya di luar" paradigma modern dalam arti bahwa ia menilai modernisme bukan dari kriteria modernitas, tetapi melihatnya dengan cara kontemplasi dan dekonstruksi.¹ Posmodernisme bukanlah suatu bentuk gerakan yang utuh dan homogen di dalam dirinya sebagaimana ditemui dalam bentuk pemikiran modernisme yang selalu sarat dengan sistematika, formalitas, dan keteraturan. Sebaliknya, posmodernisme adalah sebuah gerakan yang mengandung keanekaragaman pemikiran yang meliputi Marxisme Barat, strukturalisme Perancis, nihilisme, etnometodologi, romantisisme, populisme, dan hermeneutika². Mungkin karena adanya keberagaman inilah akhirnya posmodernisme tidak mempunyai "bentuk" yang jelas. Tetapi "tidak berbentuknya" posmodernisme ini justru merupakan "bentuk asli" dari dirinya.

Gerakan ini muncul karena modernisme dianggap telah menciptakan ketidakberesan dalam kehidupan manusia. Modernisme tidak saja melibatkan penyebaran hegemoni peradaban Barat, industrialisasi, urbanisasi, teknologi, dan

¹ Hadiwinata, Bob Sugeng, "Theatrum Politicum" Posmodernisme dan Krisis Kapitalis Dunia, *Kalam* (Edisi 1, 1994), 23.

² *Ibid*, 31

konsumerisme, tetapi juga melahirkan rasisme, perbedaan kaya dan miskin, diskriminasi, pengangguran dan stagnasi³. Di samping itu, terdapat juga pendapat bahwa modernisme telah menciptakan banyak konsekuensi buruk pada tatanan praktis kehidupan sosial manusia.

Dari kenyataan tersebut, sudah cukup untuk menghujat kegagalan modernisme, yaitu kegagalan modernisme dalam memenuhi janji-janjinya untuk membahaskan manusia dari kesia-siaan, ketidakpedulian, dan irrasionalitas⁴.

Akuntan dan Sifat yang Egoistik.

Dilihat secara eksplisit bahwa hasil penafsiran akuntan terhadap realitas (misalnya, laporan keuangan) akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan dan pembentukan kembali realitas, karena laporan keuangan (di mana di dalamnya terdapat informasi akuntansi) dipakai oleh para pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang. Melihat begitu besarnya pengaruh akuntansi dalam membentuk realitas, alangkah baiknya akuntan tidak melihat dirinya sendiri sebagai agen yang pasif (*a passive agent*) yang cuma mempraktikkan bentuk teknik akuntansi, tetapi hendaknya menganggap dirinya sebagai agen yang merupakan bagian dari atau secara aktif terlibat dalam proses pembentukan realitas sosial, yang mampu menginterpretasikan akuntansi sebagai realitas di mana maknanya (*the meanings of the reality*) akan menjadi sumber bagi pembentukan realitas sosial. Namun, pandangan apakah akuntan adalah agen yang aktif

³ Ibid, 23

⁴ Hadiwinata, Bob Sugeng, "Theatrum Politicum" Posmodernisme dan Krisis Kapitalis Dunia, *Kalam* Edisi 1 1994, 23

atau pasif sangat bergantung pada persepsi akuntan itu sendiri tentang hakikatnya dirinya dan bagaimana dia melihat realitas. Dalam ini, untuk mengungkapkan bahwa sebagian individu menganggap diri mereka sendiri dan pengalaman mereka sebagai produk dari, dan secara mekanis serta deterministik ditentukan oleh, lingkungan mereka. Dengan demikian, mereka cenderung memahami lingkungan sebagai struktur yang tetap, konkret dan keras, serta berdiri secara bebas dari pemikiran dan perasaan individu sebagai manusia, dan memandang individu sebagai makhluk yang lahir dan hidup dalam realitas yang sudah ada. Sebaliknya, yang lain beranggapan bahwa diri mereka adalah individu yang memiliki kebebasan, yang mempunyai kapasitas untuk mencipta secara aktif lingkungan mereka. Mereka menyadari bahwa dirinya adalah pencipta dan pengendali dari realitas yang telah di ciptakannya. Mereka memahami realitas sosial ini sesungguhnya tidak lebih dari nama-nama, label-label dan konsep-konsep yang digunakan secara aktif untuk membangun realitas social..

Pada posisi yang sama, yaitu dengan melihat penting pengaruh informasi akuntansi terhadap pembentukan realitas, yang pada akhirnya juga mengklaim bahwa akuntansi adalah sebuah praktik moral⁵. Hal ini demikian, karena akuntan dapat mengubah lingkungan dan mempengaruhi pengalaman hidup orang lain dengan cara yang menyebabkan pengalaman hidup seseorang menjadi berbeda dengan tidak adanya akuntansi atau adanya bentuk alternatif akuntansi.

⁵ Francis, Jere R, *Accounting as a Moral and Discursive Practice*, accounting, auditing and accountability journal 1990, 7

Dari urian di atas dapat kita pahami bahwa "diri" akuntan adalah faktor terpenting dalam menentukan warna dan bentuk akuntansi dan realitas sosial yang akan dibentuknya. Dalam "diri" akuntan, dalam paradigma modernisme, selalu dituntut untuk berfikir "rasional" dalam membuat asumsi-asumsi, konvensi-konvensi, dan teori-teori akuntansi atau perangkat-perangkat lainnya dalam akuntansi. "berfikir rasional" atau "rasio" merupakan jargon utama digunakan sejak zaman pencerahan. Rasio dapat dipandang sebagai alat yang digunakan untuk mencapai kedewasaan, yaitu situasi kemandirian diri atau pembebasan "diri" dari otoritas yang berada diluar dirinya. Rasio, karena dianggap begitu unggul, merupakan bagian yang ada dalam "diri" yang partikular dan menghasilkan kebenaran-kebenaran mutlak yang tidak terikat waktu.⁶

Rasio adalah penggerak jalannya sejarah, dengan kata lain, sejarah, merupakan perwujudan dari rasionalitas yang bergerak secara dialektis yang bergerak kearah pencapaian totalitas dan kesempurnaan rasio : gerak dialektis ini, merupakan klaim universalitas, karena dialektika akan menyedot "sang lain" (yang berada di luar orbit) ke dalam orbitnya, sehingga "sang lain" yaitu segala sesuatu yang berbeda, bersifat oposisi, dan kontradiksi, semuanya akan lebur melalui gerak dialektis menuju totalitas dan kesempurnaan rasio.⁷ Dari semuanya ini menandakan bahwa penggunaan rasio dalam wacana kemodernan merupakan elemen sentral dan salah satu bentuk logsentrisme yang tidak dapat ditinggalkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek keilmuan. Ini juga merupakan suatu

⁶ Sahal, Ahmad, Kemudian, dimanakah emansipasi? Tentang Teori kritis, Geneologi dan dekontroksi, Kalam Edisi 1, 1994, 13

⁷ Ibid 13

indikator bahwa konstruksi, bentuk, dan praktik akuntansi merupakan perwujudan dari gerak rasionalitas menuju pencapaian totalitas dan kesempurnaan hidup manusia.

Rasio, dalam wacana kemodernan, sudah menjadi mitos bahwa rasio adalah alat tunggal dan hanya dengan rasiolah manusia akan mampu mencapai kesempurnaan hidup. Penggunaan "sang lain" sebagai alternatif atau sebagai pelengkap rasio tidak akan pernah eksis, karena dengan gerak dialektis, "sang lain" akan lebur ke dalam, atau bahkan, tersingkir dari orbit rasio yang memiliki kuasa yang sangat kuat.

Hal semacam ini, menurut posmodernisme, adalah suatu bentuk "kesewenang-wenangan". Oleh karena itu, secara moral, posmodernisme mempunyai kewajiban untuk melakukan dekonstruksi, dalam arti memasukkan "sang lain" ke dalam orbit wacana yang sedang dominan. "sang lain" di sini adalah "hati nurani". Hati nurani adalah sebuah locus yang dapat memberi sinyal-sinyal kepada "diri" manusia bahwa apa yang akan dilakukannya itu sesuai dengan fitrah kemanusiaannya yang sejati atau tidak. Hati nurani adalah fakultas esoteris yang dimiliki setiap manusia yang mempunyai sifat untuk selalu cenderung kepada kebenaran. Untuk mengasah ketajaman dan kepekaan fungsi dari hati nurani ini biasanya, dalam ajaran agama, selalu diasah dengan melakukan ibadah-ibadah ritual dan kontemplasi esoteris yang sangat intens. Ketajaman dan kepekaan hati nurani ini bergantung pada keseriusan usaha yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan.

Hati nurani, jika dipahami lebih mendalam, merupakan "api" yang memancarkan cahaya etika dari dalam "diri" manusia. Ketika api ini padam, maka lenyap pulalah cahaya etika yang memancar dari kalbu. Dan ketika cahaya etika ini lenyap dari "diri" seseorang, maka lenyap pulalah praktik kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada nilai-

nilai etika. Oleh karena itu, disinilah sebetulnya letak pentingnya memasukkan hati nurani sebagai "sang lain" ke dalam wacana kehidupan sehari-hari. Jadi, secara ideal, setiap manusia harus mampu menghidupkan nyala api etika yang ada dalam dirinya termasuk "diri" akuntan.

"Diri" akuntan yang posmodern adalah "diri" yang memiliki api etika, yang dengan api ini ia mampu menginteraksikannya dengan rasio. Sehingga dengan interaksi ini (interaksi antara hati nurani dan rasio) akhirnya akan diperoleh "wujud konkret etika" yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Wujud konkret etika di sini tidak lain adalah ilmu pengetahuan, apapun wujud dari ilmu pengetahuan tersebut, termasuk akuntansi. Tegasnya, hati nurani adalah fakultas internal yang bersemayam dalam diri seseorang, yang dengan ketajaman dan kepakaannya selalu berusaha untuk berinteraksi dengan, dan memberikan pegangan etis kepada, rasio dalam mengarahkan setiap aksi konkret (tindakan nyata) maupun abstrak "(yaitu, mengonstruksi ilmu pengetahuan). Sedangkan ilmu pengetahuan, sebagai produk dari interaksi internal antara lain nurani rasio, adalah bentuk "konkret" nilai etika. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan adalah bentuk hukum positif etika, bersifat eksoteris, yang berfungsi memberikan arah dan pedoman atas setiap tindakan praksis yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, ketika "diri" akuntan posmodern menginteraksikan hati nurani dan rasionya, maka pengetahuan teori akuntansi yang konstruksinya tidak lain adalah "hukum positif" akuntansi yang eksoteris ini akan menjadi suatu bentuk praktik akuntansi yang benar-benar sarat dengan nilai-nilai etika bila secara kontinu tetap berinteraksi dengan hati nurani dan rasio sebagai unsur esoteris. Bila kondisi semacam ini terpenuhi, maka realitas sosial yang tercipta adalah realitas sosial humanis yang sarat dengan nilai-nilai etika, yang pada

akhirnya, juga akan menjaring individu-individu anggota masyarakat dalam ikatan jaring-jaring etika.

Kapitalisme, akuntansi, dan masyarakat kapitalistik merupakan refleksi atau hasil dari eksternalisasi, sifat "diri" (self)⁸ "Diri" pada dasarnya memiliki dua sifat yang kontradiktif, yaitu sifat egoistik (egoistic, selfish) yang selalu mementingkan diri sendiri, dan sifat altruistik (altruistic) yang mendahulukan kepentingan orang lain. Kedua sifat ini memengaruhi cara berfikir, perilaku, dan aksi yang dilakukan oleh "diri".

Pada saat sifat egoistik sangat dominan dibanding dengan sifat altruistik, maka sifat ini menstimulasikan pikiran "diri" untuk bertindak, membentuk, konsepsi ekonomi dan akuntansi secara teoretis ataupun praktis, dan membangun struktur dan sistem yang dapat membumikan secara mapan konsep yang ada. Sifat yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap terbentuknya sistem ekonomi kapitalis yang mementingkan "diri" sendiri atau kelompok tertentu, yaitu kapitalis. Dalam skala lebih kecil, sifat tersebut akan mendasari bentuk dan tujuan organisasi (perusahaan). Perusahaan akhirnya, dimengerti sebagai sebuah entitas yang digunakan untuk menghimpun laba sebanyak-banyaknya bagi kepentingan pemilik kapital. Kemudian, atas dasar ini perangkat-perangkat perusahaan dari sistem informasi akuntansinya sampai pada pola-pola bisnisnya disusun sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian laba yang maksimal tadi.

Hal yang sama terjadi pada sifat altruistik. Sifat ini dapat mendasari semua tindakan yang dilakukan "diri".

⁸Self adalah istilah yang umum ditemui dalam psikologi sosial khususnya dari perspektif symbolic interactionism. Dalam bahasa Indonesia self dapat diterjemahkan sebagai "diri" atau "jiwa"

Secara konkret, sifat ini memelopori terbentuknya konsep dan sistem ekonomi sosialis. Konsep dan sistem ini, dengan kuasa yang dimilikinya, mampu membentuk sifat dan operasi organisasi serta perangkat organisasi, termasuk di dalamnya sistem informasi akuntansi, yang bercorak altruistic.⁴

Akuntansi yang kapitalistik maupun sosialis adalah bentuk-bentuk akuntansi yang sangat mudah diciptakan, karena akuntansi yang demikian terbentuk dari sifat yang melekat secara inheren dalam "diri". Tambahan lagi, "kemudahan" itu juga tercipta karena realitas yang mengitari akuntansi (yaitu, sistem politik, ideologi, dan ekonomi) sangat kondusif untuk menciptakan akuntansi dengan sifat tertentu. Realitas yang dominan dan memiliki hegemoni yang kuat saat ini adalah realitas dengan tatanan kapitalistik. Karena akuntansi adalah bagian dari sistem dan tatanan kapitalistik, maka adalah suatu hal yang logis bila akuntansi tidak dapat melepaskan diri dari perangkat dan pilihan jaringan kerja realitas dengan tatanan kapitalistik.

Akuntan dan Akuntansi dalam Peran Cipta Realitas Sosial Humanis.

Gambaran bahwa terciptanya realitas sosial yang humanis dapat distimulasi dari konsep dan operasi organisasi yang dilandasi oleh nilai etika. Namun, ini bukan berarti bahwa satu-satunya jalan untuk menciptakan realitas sosial yang humanis itu hanya dari konsep dan operasi organisasi. Hal-hal lain, seperti : "diri" (ini yang utama), akuntansi, sistem pendidikan, sistem ekonomi dan bisnis, sistem politik, dan tatanan sosial serta budaya, juga dapat

⁴ Bailey, Derek T., *Accounting in Socialist Countries*, London Routledge 1988 dan *Accounting in The Shadow of stalinism*, *Accounting, Organizations and Society*, 1990

dijadikan titik-titik awal (starting points) untuk menciptakan realitas sosial yang humanis. Titik-titik awal dengan nilai etika yang mendasarinya ini kemudian dengan melalui proses interaksi sosial yang kompleks secara serentak akan membentuk realitas sosial yang humanis baik dalam skala mikro organisasi maupun skala makro tatanan sosial masyarakat.

Akuntansi dapat dijadikan sebagai sebuah titik awal untuk menstimulasikan terbentuknya realitas sosial yang humanis. Namun, untuk menjadikannya demikian tidak terlepas dari keterlibatan diri akuntan sebagai arsitek yang memiliki kuasa untuk menentukan bentuk bangunan akuntansi. Hal ini, seperti telah diketahui secara umum, akuntan mempunyai keahlian menciptakan asumsi-asumsi dan konvensi-konvensi misalnya metode penyusutan, metode penilaian persediaan, metode pengakuan pendapatan dan beban dan lain-lainnya untuk menggambarkan realitas sosial (organisasi). Dan, akuntan dengan konsep-konsepnya tersebut mereduksi realitas sosial yang sangat kompleks tadi dalam bentuk angka-angka, yaitu angka-angka sesuai prinsip akuntansi. Angka-angka ini akhirnya dikonsumsi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya akuntansi mempunyai kuasa untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan suatu tindakan. Dan, perlu diketahui, bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh: manajemen, kreditor, dan investor akan membentuk realitas yang baru di mana realitas ini pada gilirannya akan menjangkit orang lain untuk masuk ke dalam jaringan-jaringan kerjanya. Realitas "baru" ini beserta jaringan-jarainagn kerjanya juga secara dinamis berinteraksi dengan jaringan-jaringan kerja yang lain seperti ekonomi, sistem politik, kultur masyarakat, legal system, dan sistem sosial

yang dalam bentuk lebih makro juga akan membentuk realitas sosial dengan warna tertentu.

Ketika, misalnya, akuntan membangun akuntansi dengan asumsi-asumsi, konvensi-konvensi, dan teori-teori yang "bebas nilai" (value free) (sebagaimana diklaim oleh akuntansi positif yang merupakan produk modernisme), maka akuntansi yang diciptakan akan menggiring para penggunaanya kepada keputusan dan tindakan yang juga "bebas nilai". Dan akhirnya, realitas yang tercipta adalah realitas yang "bebas nilai" (atau kering dari nilai-nilai etika, misalnya). Yang dengan jaringan-jaringan kerjanya memperangkap individu-individu dalam masyarakat (dalam skala mikro dan makro) ke dalam realitas yang "bebas nilai". Dengan kata lain, realitas ini mengitari kehidupan individu-individu anggota masyarakat yang secara pasti akan membentuk perilaku dan kepribadian individu-individu yang bersangkutan dengan karakter yang sama dengan realitas sosial yang menjadi lingkungannya. Yang cukup memprihatinkan di sini adalah bahwa realitas semacam ini sudah dianggap sebagai realitas yang sejati, padahal dalam realitas tersebut, yang merupakan produk dari modernisme, sedang terjadi proses dehumanisasi.¹⁰

Untuk keluar dari realitas sosial yang kering dengan nilai-nilai etika (yang dibentuk oleh akuntansi positif) ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Di sini diperlukan pemikiran yang intens agar bisa keluar dari jaringan-jaringan kerja yang sudah mapan dan dominan; keluar untuk melihat realitas sosial dalam perspektif yang lebih luas dan kemudian melakukan suatu perubahan. Upaya semacam ini sudah mulai tampak dengan munculnya akuntansi interpretif dan

¹⁰ Sahal, Ahmad, Kemudian, dimanakah emansipasi? Tentang Teori kritis, Geneologi dan dekontroksi, Kalam Edisi I, 1994, 14

akuntansi kritis. Perubahan bisa saja terjadi, terutama yang dilakukan oleh akuntansi kritis. Karena akuntansi kritis, akuntansi interpretif tidak membawa misi emansipasi, melainkan tetap mempertahankan status quo. Namun di sisi lain, akuntansi interpretif berusaha memberikan kesadaran ontologis bahwa relitas sosial praktik-praktik akuntansi, misalnya sebenarnya secara sosial diciptakan oleh manusia, bukan sesuatu yang sudah ada (given) "diluara sana" dan diterima secara taken of granted.¹¹ Dengan kata lain, akuntansi interpretif ingin menunjukkan bahwa realitas sosial sebetulnya tidak pernah objektif dan tidak pernah pula independen atau bebas dari nilai manusia yang menciptakannya. Jadi, realitas sosial adalah subjektif.

Usaha untuk keluar dari realitas yang diciptakan oleh akuntansi positif juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh posmodernisme, yaitu dengan pendekatan kontemplasi dan dekonstruksi. Posmodernisme meletakkan dirinya "diluara" paradigma dalam arti bahwa ia menilai modernisme bukan dari kriteria modernitas, tetapi melihatnya dengan cara kontemplasi dan dekonstruksi¹².

Kontemplasi dalam arti melakukan suatu betuk pemikiran rasional yang melibatkan "hati nurani" tentang realitas yang diciptakan oleh modernitas dan melakukan dekonstruksi dalam arti memasukkan "sang lain" (yang selama ini dalam pandangan modernisme dalam posisi marginal) ke dalam orbit yang harus, atau patut, diperhitungkan adalah suatu upaya perubahan, yaitu suatu upaya

¹¹ Lihat Chua, Wai Fong, *Interpretive Sociology and management accounting research - a critical Review*, accounting auditing & Accountability Journal, 1989

¹² Hadiwinata, Bob Sugeng, "Theatrum Politicum" Posmodernisme dan Krisis Kapitalis Dunia, Kalam Edisi 1 1994, 23

perubahan akuntansi dan realitas sosial yang diciptakannya, yaitu "diri" akuntan dan akuntansi (dalam bentuk teori atau praktik).

Sifat egoistik dan altruistik adalah sifat yang secara inheren tertanam dalam "diri". Sifat-sifat ini menjadi tidak humanis manakala keduanya ditempatkan pada posisi ekstrem dan mutually exclusive (saling meniadakan) antara sifat yang satu dengan yang lain. Modernisme, dengan pola pikir oposisi, dapat menempatkan sifat egoistik pada kedudukan sentral dan sebaliknya mensubordinasikan sifat altruistik yang berada dalam posisi hierarki lebih rendah. Bagi posmodernisme, hal semacam ini dapat menimbulkan ketimpangan dan kerusakan. Karena dengan cara menempatkan egoistik pada posisi sentral dan mengeliminasi altruistik tidak saja dapat mengalienasi "diri" yang menciptakan konsepsi ini, tetapi juga dapat memperbudak dan mengeksploitasi manusia "diri" lain serta alam lingkungannya. Dan akhirnya manusia akan menyerahkan dirinya, secara sadar atau tidak, sebagai elemen yang mati dalam proses produksi, mekanisasi, otomatisasi dan standarisasi yang diciptakan sendiri oleh manusia modern.

Posmodernisme memandang bahwa realitas yang egoistik dan matrealistik adalah realitas yang mengalienasi hakikat diri manusia. Tidak aneh bila akhirnya pos modernisme mengemukakan bahwa modernisme telah gagal dalam mengangkat manusia pada posisi "diri" dan tatanan sosial, yang "utuh". Oleh karena itu, dengan metode dekonstruksinya, posmodernisme berusaha memberikan pemikiran-pemikiran alternatif dalam rangka melakukan perubahan. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan "sang lain" dalam wacana-wacana yang selama ini "mengharamkan" "sang lain" untuk hadir di dalamnya. Dekonstruksi memandang bahwa sesuatu yang berbeda, misalnya, "logosentrisme" dengan "sang lain",

materi dengan spirit, akal dengan hati, egoistik dengan altruistik, dan lain-lainnya, sebagai sesuatu yang saling mengisi atau melengkapi (*mutually inclusive*), dan sebaliknya bukan merupakan sesuatu yang saling meniadakan (*mutually exclusive*). Oleh karena itu, peniadaan sesuatu yang lain akan menyebabkan adanya ketidak utuhan, ketidak seimbangan, dan akhirnya kerusakan, seperti yang telah digambarkan di atas.

Modernisme, yang mengkonsepsi perusahaan sebagai sebuah entitas yang didirikan (oleh pendirinya) dengan tujuan utama memaksimalkan laba untuk kepentingan pemilik kapital (*shareholders*),¹³ dianggap oleh posmodernisme sebagai suatu bentuk kesalahan yang fatal, karena konsep ini meniadakan unsur "sang lain" (yaitu, unsur altruistik).

Upaya perbaikan, baik dari sisi konsep teori maupun sistem praktis, telah dilakukan oleh para ahli yang berfikir kritis. Mereka, misalnya, memandang bahwa perusahaan tidak lagi sebuah entitas yang terpisah dari lingkungannya sebagaimana dipahami oleh paham modernis yang fungsionalis dan positivistik, namun ia bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya sebagaimana dipahami oleh paham modernis yang fungsionali dan positivistik, namun ia bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Ia hidup karena berada dalam lingkaran proses interaksi sosial. Atas dasar pemikiran ini, perusahaan tidak lagi di pandang sebagai lembaga bisnis yang semata-mata beroperasi untuk meraih keuntungan, tetapi mulai melihat sisi lain yang berupa peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat interen perusahaan maupun eksteren perusahaan (*stakeholders*).

¹³ Konsep perusahaan yang memaksimalkan laba tidak terlepas dari pengaruh kuasa yang ditebarkan oleh jaring-jaring konsepsi ekonomi kapitalistik (egoistik), yang juga merupakan logosentrisme dari modernisme

Konsep ini menempatkan posisi perusahaan sebagai entitas yang lebih altruistik (sosial), atau, *less egoistic*, karena sebaran "kesejahteraan" (yang pengertian "kesejahteraan" itu sendiri tidak semata-mata dalam bentuk materi) tersebar lebih merata dibandingkan dengan konsep yang pertama. Kesejahteraan, dalam hal ini, dapat dirasakan oleh komunitas yang lebih luas, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, seperti : pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, investor, pelanggan, pemerintah, dan lain-lainnya.

Akuntansi Dilingkup Politik dan Kapitalisme

Posmodernisme yang diartikulasikan dalam *Power/knowledgenya* jelas-jelas mengatakan bahwa ada hubungan timbal-balik antara kuasa dan pengetahuan atau bahkan dikatakan bahwa kuasa adalah pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri adalah kuasa.¹⁴

Dalam kajian mikro individual atau "diri" (self), pengetahuan dapat mempengaruhi atau membentuk pola berfikir individu yang bersangkutan. Pola pikir ini, setelah melalui proses interaksi internal dan eksternal direfleksikan dalam bentuk buah pikiran dan aksi. Buah pikiran dan aksi ini, adalah kuasa atau, memiliki kuasa yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan membentuk realitas sosial maupun pengetahuan itu sendiri. Proses ini berjalan terus menerus tanpa henti, sehingga kuasa, disadari atau tidak akan hadir secara samar.

Pada skala makro, pengetahuan dengan kuasa yang kuat akan mampu membentuk tatanan sosial yang kuat pula dan, bahkan dapat memperangkap individu-individu anggota masyarakat ke dalam jaringan kuasa dan

¹⁴ Foucault, M., *Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, (New York: Pantheon Books, 1981).

pengetahuan yang bersangkutan, misalnya, menyajikan metafor yang apik tentang kuasa dan pengetahuan sistem ekonomi kapitalis sebagai produk modernisme. Untuk menggambarkan hal ini, dapat menggunakan metafor "*thattrum politicum*" (panggung politik), yaitu "pertemuan antara bermacam-macam karakter dalam berbagai wacana yang telah diatur sedemikian rupa oleh para pengatur laku".

Kapitalisme dalam kenyataannya tidak beda dengan "panggung politik", yaitu sebuah ajang yang menunjukkan bahwa kepuasan akan terjadi apabila para perilaku yang terlibat didalamnya dapat memainkan perannya masing-masing dengan baik seperti yang diinginkan oleh para pengatur laku.¹⁵ Dalam konteks ini, para pemainnya adalah pemilik modal, buruh, dan negara; sedangkan yang bertindak selaku sutradaranya adalah tokoh-tokoh pemikir dan filosof ekonomi dari masa kemasa.¹⁶

Sebuah kepentingan para perilaku dan mengatur laku dipersatukan oleh kekuatan (kuasa) hegemoni kapitalisme yang terwujud dalam bentuk maksimalisasi laba, akumulasi kapital, produksi massa, dan konsumerisme.¹⁷ Interaksi yang dilakukan oleh para pelaku membuahkan realitas sosial dengan tatanan ekonomi kapitalis sebagaimana dikehendaki oleh para sutradaranya. Tatanan ini begitu kuatnya, sehingga mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan hegemonis yang mengesampingkan "sang lain" (misalnya, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Islam, dan lain-lain) di luar orbitnya. Perilaku pemain, karena begitu kuatnya hegemoni ini, benar-benar menyatu dengan "karakter" yang dikehendaki oleh sutradara. Bahkan perangkat kehidupan

¹⁵ Lihat Hadiwinata, Bob Sugeng, "Theatrum Politicum" Posmodernisme dan Krisis Kapitalis Dunia", *Kalam* (edisi 1, 1994).

¹⁶ Ibid, 24

lainnya seperti bentuk dan struktur organisasi, instrumen sistem informasi organisasi, skill dan pengetahuan yang ditanamkan pada sumber daya manusia, dibuat dan dibangun sedemikian rupa berdasarkan jiwa hegemoni kapitalisme.

Kapitalisme sebagai pengetahuan dengan kuasa yang kuat mampu membentuk, seperti yang di singgung diatas, pola pikir seseorang individu menjadi pola pikir yang kapitalis. Dari pola pikir semacam ini, konsekuensinya, akan menghasilkan pengetahuan dan aksi (serta perilaku) dengan warna kapitalisme. Semuanya akan berinteraksi sedemikian rupa sehingga akhirnya terbentuk realitas sosial dengan nilai-nilai kapitalisme sebagai warna utama.

Karena realitas sosial telah terbentuk dengan nilai-nilai kapitalisme, maka mau tidak mau akuntansi akhirnya juga mempunyai warna yang sama dengan realitas sosial yang mengitarinya. Mengapa demikian? Karena akuntansi di bentuk oleh, faktor kultur masyarakat, sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, dan bentuk organisasi. Dalam hal ini, cukup memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk akuntansi yang di praktekkan di negara-negara sosialis. Dari penjelasan di atas terungkap bahwa akuntansi yang dipraktekan di negara-negara tersebut ternyata sarat dengan nilai-nilai sosialis yang tentu sangat berbeda dengan kapitalisme.

Faktor sistem politik (ideologi) dan ekonomi adalah faktor-faktor penentu yang mempunyai andil besar dalam memberikan kontribusi warna dan bentuk akuntansi. Ketika misalnya, penguasa dari suatu negara "terperangkap" untuk memilih sistem politik sosialis, maka pilihan untuk menggunakan sistem ekonomi sosialis adalah menjadi konsekuensi yang tidak dapat dielakkan, demikian juga akuntansi yang akan digunakan sebagai instrumen sistem ekonomi yang bersangkutan. Namun sebaliknya, bila pilihan

itu jatuh pada kapitalisme, maka adalah suatu hal yang logis bila akuntansi kapitalis (dalam hal ini adalah akuntansi positif) juga akhirnya menjadi logosentrisme. Begitu kuatnya hegemoni yang ditanamkan oleh akuntansi positif, sungguh sangat sulit dibayangkan bagaimana perusahaan-perusahaan bisa eksis tanpa akuntansi keuangan. Tanpa akuntansi keuangan, perusahaan-perusahaan tidak mungkin dapat diukur. Dari mana kategori-kategori tertentu bisa diperoleh, yang dengannya kita bisa memikirkan, mengakui dan membuat keputusan serta melakukan tindakan berdasarkan kategori-kategori tersebut, jika tidak dari akuntansi keuangan ? Apa jadinya "posisi keuangan" (*financial position*) atau "kinerja" (*performance*) atau "besar" nya (*size*) , "utang" (*liabilities*), "modal" (*capital*) dan "laba" (*profit*), pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan, kinerja dan ukuran dari perusahaan akan sulit dijawab. Sulit membayangkan dunia ekonomi tanpa akuntansi keuangan (dan manajemen) dan tanpa akuntansi keuangan, atau ketiadaannya, seperangkat alternatif praktik-praktik sosial, dunia ekonomi, dan kemudian masyarakat seperti yang kita ketahui sekarang, tidak akan eksis.¹⁷

Pernyataan Hines ini, kalau tulisannya yang berjudul *The Sociopolitical Paradigma in Financial Accounting Research* dibaca secara cermat, sebetulnya adalah pernyataan yang menggunakan gaya sinisme, karena dia sendiri memberikan kritik-kritik tajam terhadap akuntansi positif yang mengklaim dirinya sebagai praktik yang independen, netral, dan bebas dari nilai. Klaim-klaim semacam ini merupakan klaim yang khas yang banyak ditemui pada akuntansi positif dan ilmu-

¹⁷ Ibid, 25

¹⁸ Hines, Ruth D, "The Sociopolitical Paradigm In Financial Accounting research, *accounting, Auditing, and Accountability Journal*" (1989),60.

ilmu positif lainnya termasuk ilmu ekonomi kapitalis. Dan, klaim ini memang merupakan logosentrisme dalam ilmu-ilmu positif produk modernisme.

Oleh karena itu, mengingatkan bahwa praktik dan standard akuntansi yang berpengaruh terhadap ukuran, kinerja, dan kesehatan perusahaan, mempengaruhi perilaku dan realitas sosial, tidak terlepas dari campur tangan politik yang boleh jadi bersifat kontroversial dan bertentangan antara satu pihak dengan pihak lain. Sejak penetapan standard (*standard setting*), akuntansi mulai di mengerti sebagai kegiatan politik, pihak profesi akuntansi dan badan yang menetapkan standard (*standard setting boards*) menghadapi masalah dalam mempertahankan "kesucian" pengertian bahwa akuntansi secara independen dan netral "mengukur" realitas.¹⁹

Pada skala mikro, kita akan melihat bahwa akuntansi positif merupakan anak dari sistem ekonomi kapitalistik. Ciri maksimalisasi laba dan akumulasi kapital merupakan identitas utama yang tidak dapat di pisahkan dari akuntansi. Maksimalisasi laba, misalnya, akan terlihat pada the bottom line dari Laporan Rugi-Laba (*Income Statement*) dengan nama Laba Bersih yang tinggi merupakan tujuan utama (manajemen) perusahaan yang juga menjadi kepentingan bagi pemilik perusahaan/ pemegang saham (*shareholders*), investor, dan kreditor. Semakin tinggi angka akuntansi (*accounting number*) yang menempel pada laba bersih, maka semakin baik kinerja dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan ciri akumulasi kapital akan tampak pada neraca dengan label laba yang ditahan yang merupakan bagian dari Ekuitas (*equity*), atau dilaporkan secara khusus dalam laporan laba yang di tahan (*Retained Earning Statement*).

¹⁹ Ibid., 61.

Atau, akumulasi kapital itu berupa Ekuitas itu sendiri beserta komponen-komponennya seperti modal saham (biasa atau preferen), agio/ disagio saham, laba yang ditahan, dan lain-lainnya. Semakin besar komposisi ekuitas ini terhadap jumlah hutang, maka semakin aman investasi yang ditanamkan oleh investor (atau kreditor) pada perusahaan. Ini merupakan ilustrasi sederhana dari dua ciri utama akuntansi yang menonjol.

Analisis-analisis tertentu seperti analisis rasio (profitabilitas, rentabilitas, aktivitas, solvabilitas, dan likuiditas) juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan perusahaan (stakeholders) untuk menilai perusahaan. Sepintas, kita dapat melihat bahwa alat-alat analisis ini sebetulnya juga tidak terlepas dari hegemoni kapitalisme. Adalah suatu hal yang logis bila akhirnya perilaku dan aksi (tindakan) stakeholders merupakan perilaku dan aksi kapitalistik. Hal ini demikian, karena informasi yang digunakan oleh stakeholders adalah angka-angka akuntansi (*accounting numbers*) yang disajikan dalam laporan keuangan dan alat analisis yang dipakai juga mempunyai nilai yang sama.

Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, akhirnya angka-angka akuntansi menjadi angka-angka yang "sakral" yang dianggap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui pengambilan keputusan ekonomi. Dan, sebagai penyedia informasi, akuntansi juga dapat digunakan sebagai, misalnya alat pengawasan manajemen (management control), alat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, alat untuk menurunkan *agency cost*, dan lain sebagainya.

Hegemoni akuntansi positif yang kapitalistik begitu kuat, sehingga ketika seseorang membicarakan akuntansi dalam konteks sosial, organisasi, politik, dan filsafat, atau mengajukan bentuk akuntansi lain, maka hal tersebut akan

sulit diterima. Karena semuanya, berada di luar orbit logosentrisme akuntansi positif. Hal ini dibuktikan juga oleh, misalnya, adanya ide "pembaruan" pemikiran akuntansi dengan pendekatan filsafat dan nilai-nilai etika Islam. Kemudian akan timbul sebuah pertanyaan dan kegundahan, bagaimana mungkin bisa terjadi atau ada bentuk akuntansi di luar prinsip-prinsip yang sudah baku ? Apakah mungkin akuntansi yang berada di luar prinsip prinsip yang sudah baku bisa di terima ?. Bagi seorang modernis, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tidak mungkin ! Karena, pemikiran-pemikiran akuntansi yang berada pada posisi marginal adalah tidak layak untuk diperhitungkan. Namun, nada-nada komentar seperti tersebut diatas adalah "wajar" karena hegemoni akuntansi positif cukup lama berlangsung dan bahkan dapat dikatakan seumur dengan modernisme itu sendiri. Keterangan-keterangan diatas tidak lain merupakan refleksi atas realitas sosial yang ada sekarang, yaitu realitas yang sarat dengan hegemoni akuntansi positif yang tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis dan kehidupan masyarakat.

Merekonstruksi Akuntansi

Akuntansi Syariah Seperti telah diketahui bahwa interaksi internal yang intens antara hati nurani dan rasio akan menghasilkan pengetahuan (teori) akuntansi yang sarat nilai - nilai dan etika. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seseorang dapat mengkonstruksi pengetahuan (teori) akuntansi, yang mampu menghasilkan praktik-praktik akuntansi yang sarat dengan nilai etika? Untuk menjawab pertanyaan ini, pendekatan filosofis epistemologis sangat diperlukan.

Akuntansi syariah²⁰ dalam hal ini, menawarkan pendekatan filosofis untuk merekonstruksi akuntansi. Nilai filosofis yang secara mendasar terkandung di dalamnya filsafat (nilai) "berpasangan". Filsafat "berpasangan" ini pada hakikatnya memandang bahwa pola sistem berpikir oposisi biner, pada saat sekarang ini, sudah tidak tepat lagi untuk tetap digunakan dalam kehidupan yang semakin kompleks dan global. Sebagaimana disinggung sebelumnya, pola berpikir oposisi biner cenderung untuk selalu bersikap "saling meniadakan" (*mutually exclusive*), yaitu menandakan "sang lain" yang berbeda dengan yang dipusat yang akhirnya cenderung untuk menciptakan suatu "penunggalan". Sebaliknya, filsafat "berpasangan" menganggap bahwa segala sesuatu yang berbeda itu sebetulnya adalah suatu potensi yang akan memiliki kuasa yang sangat besar bila elemen-elemen yang berbeda tadi saling mengisi dan memperkuat (*mutually inclusive*). Dengan kata lain, filsafat "berpasangan" menolak adanya "penunggalan", tetapi sebaliknya mengakui adanya "kemajemukan".

Akuntansi syariah dengan filsafat "berpasangan"-nya itu sebetulnya menawarkan langkah-langkah dekonstruksi terhadap pola pemikiran akuntansi modern. Pada tatanan filosofis, misalnya, akuntansi syariah melakukan langkah-langkah dekonstruksi pada setiap lapisan filsafat keilmuan, yaitu pada lapisan hakikat manusia (*human nature*). Pada lapisan hakikat manusia (*human nature*), akuntansi syariat memandang bahwa.

²⁰ Akuntansi Syariah pada dasarnya adalah bentuk akuntansi (yang belum memiliki bentuk) yang memberikan alternatif filosofis dalam upaya "merekonstruksi" akuntansi. Akuntansi syariah sendiri dibangun dengan nilai-nilai agama (Islam). Namun ini bukan berarti bahwa akuntansi syariah bersifat sektarian, karena ia bersifat terbuka (*all inclusive*) "membumi" (dalam arti sesuai dengan karakter manusia), dan mengandung nilai-nilai universal serta lokal. Untuk memahami akuntansi syariah secara lebih mendalam lihat Triyuwono (1996, 1995)

Pertama, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bebas dan sekaligus terikat. Ini artinya bahwa manusia mempunyai kebebasan yang penuh dalam usaha mengaktualisasikan potensi yang ada dalam dirinya, namun pada saat yang bersamaan ia secara moral harus yang bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan. Pandangan ini tentu berbeda dengan modernisme yang melihat hakekat manusia pada dua sifat yang antagonistik yaitu terkait (determinism/pasif) dan bebas (voluntarism/aktif) dan saling meniadakan.

Kedua, manusia adalah makhluk yang mempunyai sifat atau kapasitas "ketuhanan" dan "kemakhlukan" yang dengannya manusia di utus ke bumi untuk menciptakan dan menebarkan kesejahteraan atau kebaikan untuk seluruh makhluk. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa semua tindakannya harus dikonfirmasi dengan kapasitas "ketuhanan" yang dimiliki, yang dalam hal ini terutama adalah "hati nurani". Oleh karena itu, adalah suatu hal yang logis bila manusia tersebut adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dalam tindakan konkret dan abstrak serta sekaligus mengangkat diri pada "hati nurani" agar segala tindakannya selalu berpijak pada nilai "ketuhanan" yaitu nilai-nilai etika.²¹

Pada lapisan ontologi, akuntansi syariah mempunyai anggapan bahwa realitas sosial adalah wujud konkret dari ide yang dimiliki oleh seseorang. Dimana realitas sosial ini dibentuk melalui proses interaksi sosial yang tanpa henti. Pandangan ini berbeda dengan modernisme yang memandang realitas sosial dari dua titik pandang.

Pertama menganggap bahwa realitas sosial itu tidak lain adalah nama-nama, label-label, dan ide-ide abstrak

²¹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah, Perspektif, Metodologi, Dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 143-144.

manusia (nominalism) yang dengan sendirinya melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang abstrak. Kedua menganggap bahwa realitas sosial sebagai sesuatu yang konkret dan nyata (realism). Kedua pandangan ini dalam wacana kemodernan bersifat saling meniadakan. Dan, dalam mainstream wacana kemodernan, pandangan kedua, yaitu realism, menduduki posisi sentral, sehingga bukan suatu hal yang aneh bila nominalism berada pada posisi marginal. Hal ini juga tidak terlepas dari pengertian dari hakikat manusia sebagai makhluk "terikat". Pengertian manusia sebagai makhluk terikat (pasif) mengakibatkan suatu anggapan bahwa realitas sosial adalah sesuatu yang sudah given. Dengan kata lain, relitas sosial yang ada di sekeliling kehidupan manusia adalah suatu yang sudah terbentuk, dan manusia tidak mempunyai daya untuk mengonstruksi atau merekonstruksi realitas sosial yang melingkunginya (yang sebenarnya) mengasingkan dirinya. Akuntansi syariah yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif dan bertanggung jawab mengklaim bahwa realitas sosial adalah secara aktif, diciptakan oleh manusia. Bentuk realitas sosial yang diinginkan oleh akuntansi syariah adalah realitas sosial yang humanis, transedental, dan teleologikal. Humanis berarti bahwa relitas sosial yang diciptakan tadi mempunyai karakter kemanusiaan, sehingga (realitas sosial) akan sesuai dengan manusia yang ada di dalamnya. Transendental berarti bahwa relitas sosial yang diciptakan, karena diciptakan berdasarkan nilai "ketuhanan" (etika), sebetulnya tidak terbatas pada manfaat duniawi, tetapi juga ukhrawi (yaitu, setelah kehidupan di dunia). Dan teologikal mempunyai arti bahwa semuanya itu diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan kehidupannya, yaitu pencapaian the pleasure of gold.²²

²² Ibid, 144

Pada lapisan epistemologi akuntansi syariah menghendaki adanya perkawinan antara ilmu pengetahuan dan agama, rasio (akal) dan hati nurani, pendekatan empiris dan normatif, untuk menghasilkan pengetahuan (teori) akuntansi yang lebih bersifat humanis, transendental dan teleologikal. Perkawinan antara ilmu pengetahuan dan agama dalam wacana kemoderenan adalah suatu hal yang tidak mungkin²³.

Hal ini diindikasikan dengan anggapan bahwa ilmu pengetahuan memiliki domain yang berbeda dengan agama. Berdasarkan pada pemahaman ini jelas ilmu pengetahuan tidak bisa dikawinkan dengan agama.²⁴ Tetapi sebaliknya terdapat pendapat yang menyatakan bahwa aktivitas ilmiah yang ada sekarang ini dimotivasi oleh semangat utilitarisme.²⁵ Jadi, bukan suatu hal yang aneh bila tradisi ilmiah modern jelas-jelas mengklaim bahwa *religion is not a domain where reason is exercised tetapi the domain of faith, where faith and reason at times be mutually axclusive*.²⁶

Bagi akuntansi syariah mengawinkan ilmu pengetahuan (dalam hal ini adalah pengetahuan (teori) dan praktik akuntansi yang ada pada saat ini) dengan agama adalah bukan suatu hal yang tabu. Bahkan di dunia Barat pun saat ini ada kecenderungan, meskipun masih kecil, untuk menjadikan agama sebagai salah satu sumber inspirasi dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Dan usaha tersebut dilakukan terus menerus sebagai usaha untuk membendung

²³ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah*, 145.

²⁴ Welber, Ken, *Eye To Eye. The Quest For The New Paradigm*, (Boston, Shambala, 1990), 35.

²⁵ Safi, Louay, M, "Islamic Law and Society", *The American Journal Of Islamic Social Sciences*, (1990), 74.

²⁶ Bashir, Zakaria, *Towards an Islamic Theory Of Knowledge Part One*, (Arabia tp, 1986), 74.

degradasi dunia bisnis terkait dengan etika dan moral seiring globalisasi yang tidak terbendung.

Dengan pendekatan semacam ini, akuntansi syariah akan mampu memberikan nuansa keilmuan yang lebih kompherensif, humanis, transendental, dan teknologikal. Nuansa keilmuan seperti tersebut di atas memang sangat memungkinkan, karena akuntansi syariah yang posmodernis kalau bisa dikatakan begitu bersifat terbuka dan menerima kemajemukan yang tentunya berbeda dengan epistemologi positivistik modern yang bersifat menunggalkan sesuatu dengan cara menolak "sang lain". Apa yang ditawarkan oleh akuntansi syariah adalah pendekatan filosofis yang akan menjadikan pijakan untuk merekontruksi akuntansi modern agar dapat berwajah lebih kompherensif, humanis, transendental, dan teleologikal. Ide untuk merekontruksi akuntansi dengan dasar-dasar nilai etika ini adalah ide yang sangat urgent, karena bentuk akuntansi yang akan dihasilkan akan mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam ikut membantu terciptanya realitas sosial yang humanis, transendental, dan teleologikal.

Terciptanya akuntansi dan realitas sosial dengan nilai-nilai etika tersebut di atas hanya akan terealisasi bila "diri" akuntan bersifat kritis terhadap lingkungan dimana dia tinggal, hidup, dan berinteraksi. Sifat kritis ini juga tidak terlepas dari pemahaman diri tentang hakikat manusia. Jadi, "diri" akuntan tinggal memahami dirinya sebagai makhluk yang terikat, atau "bebas" atau "bebas sekaligus terikat dengan misi hidup yang menciptakan kesejahteraan dalam kebaikan bagi semua makhluk".

Kesimpulan

Kenyataan sosial yang ada saat ini adalah kenyataan sosial yang banyak dipengaruhi oleh pandangan

kapitalisme sebagai akibat dari modernisme yang mengklaim ilmu pengetahuan harus bebas dari nilai.

Posmodernisme, melihat keadaan tersebut, mencoba memberikan pandangan dari luar paradigma modernisme dengan menawarkan konsep dekonstruksi. Konsep ini pada dasarnya adalah memasukkan "sang lain" ke dalam wacana yang sedang dominan yang selama ini selalu memarginalkan "sang lain" pada posisi yang lebih rendah.

Konsekuensi dari ini adalah bahwa "diri" akuntan, sebagai seorang pelaku yang mempunyai potensi untuk membentuk realitas sosial, harus mampu memasukkan "hati nurani" ke dalam setiap wacana yang sedang digeluti oleh akuntan yang bersangkutan. Seperti telah diketahui bahwa "hati nurani" dalam wacana modernitas selalu dalam posisi marginal, sedangkan pada posisi sentral adalah "rasio", "diri" akuntan akan mampu melakukan rekontruksi akuntansi.

Rekonstruksi akuntansi dipandang perlu, karena akuntansi juga mempunyai kuasa untuk membentuk realitas sosial. Oleh karena realitas sosial yang ingin diciptakan adalah realitas sosial yang humanis, transedental, dan teleologikal, maka rekontruksi akuntansi harus dilakukan dengan nilai yang sama.

Dalam upaya tersebut, akuntansi syariah menawarkan sesuatu yang lain dan mampu berdampingan dengan akuntansi konvensional dalam sebuah prinsip yang menerima adanya kemajemukan dan sifat terbuka. Dengan pendekatan ini, akuntansi yang direkontruksi akan menjadi akuntansi yang berwajah lebih kompherensif, humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal.

Daftar Pustaka

- Triyuwono, I. *Akuntansi Syariah, Prespektif, Metodologi, Dan Teori*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Bailey, Derek T. *Accounting in Socilaist Countries*. London : Routledge.1998.
- Bashir, Zakaria. Towards an Islamic theory of Knowledge,part one, *Arabia*.1986.
- Chua, Wai Fong. Interpretive sociology and management accounting research- a Critical Review. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 1988.
- Foucault, M. *Power/Knoledge:Selected Interviews anda Other Writings*, 1980
- Francis, Jere R. Alter virtue? Accounting as a moral and discursve practice. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 3,1990
- Hadiwinatan, Bob Sugeng, "Theatrum Politicum" : Posmodernisme dan Krisis Kapitalisme Dunia. *Kalam*, Edisi 1: 1994.
- Hines, Ruth D. Financial accounting: in communicating reality, we construct reality.*Accounting, Organizations and Society* 13 (3): 1988
- Safi, LoaryM. Islamic law and society. *The American journal of Islmic Social Sciences* 7 (2): 1990
- Sahal, Ahmad. Kemudian, di manakah emansipasi? Tentang teori kritis, genealogi, dan dekontruksi. *Kalam* edisi 1:1994.
- Sugiharto, I Bambang. *Posmodernisme: Tantangan bagi Filsafat* Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1996.
- Wilber, Ken. *Eye to Eye The Quest for the New Paradigm*. Boston Shlambhala. 1990